

# **ANALISIS DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI KRISIS SEMENANJUNG KOREA GUNA MENJAGA STABILITAS KAWASAN ASIA TENGGARA**

## **ANALYSIS OF INDONESIA'S DEFENSE DIPLOMACY IN FACING THE CRISIS ON THE KOREAN PENINSULA TO MAINTAIN THE STABILITY OF THE SOUTHEAST ASIAN REGION**

Chayu Amrita Nanda<sup>1</sup>, Yoedhi Swastanto<sup>2</sup>, dan Amarulla Octavian<sup>3</sup>

Universitas Pertahanan

(chayuananda@gmail.com, yoedhiswastanto83@gmail.com,  
dan rosseauherve@gmail.com)

**Abstrak** – Dalam perspektif keamanan, wilayah Indonesia dan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan merupakan kawasan yang strategis baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun militer. Kondisi ini juga memiliki potensi dan tantangan yang kompleks dan berisiko menimbulkan ketegangan antar negara. Pasca Perang Korea dan Perang Dunia ke II perkembangan krisis di Semenanjung Korea masih terus berlanjut. Kemudian Korea Utara memilih untuk membangun kapabilitas militer yang semakin meningkat. Indonesia merupakan salah satu negara yang berdekatan dengan wilayah Semenanjung Korea dan kondisi ini dapat memberikan dampak terhadap kedaulatan dan keamanan negara Indonesia, khususnya kegiatan uji coba nuklir yang telah dilakukan oleh Korea Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Diplomasi Pertahanan Indonesia dan bagaimana peran para aktor yang terlibat dalam menanggapi isu tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini membahas isu tersebut dengan teori konstruktifis dan konsep diplomasi pertahanan dalam proses analisisnya. Hasil pembahasan penelitian ini adalah bentuk diplomasi pertahanan Indonesia dalam menanggapi krisis di Semenanjung Korea.

**Kata Kunci** : ASEAN, diplomasi pertahanan, denuklirisasi, strategi pertahanan, keamanan kawasan

**Abstract** – In a security perspective, the territory of Indonesia and the Southeast Asia region as a whole strategic areas in economic, political and military aspects. This condition also has complex potential challenges and risks for creating tension among countries. After the Korean War and World War II the development of the crisis on the Korean Peninsula continued. North Korea chose to build and increasing military capabilities. Indonesia as one of the adjacent countries to the Korean Peninsula, could get an impact to the sovereignty and security of the country. Especially caused by North Korea's nuclear testing activities. This study aims to determine the form of Indonesian Defense Diplomacy and how the roles of the involved actors in responding to the issue. By using qualitative research methods, this study discusses the issue with constructivist theory and the concept of defense diplomacy for the analysis. The results of the discussion of this research are a form of Indonesian defense diplomacy in response to the crisis on the Korean Peninsula.

**Keywords:** ASEAN, defence diplomacy, denuclearization, defence strategy, regional security

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Diplomasi Pertahanan cohort 4 Universitas Pertahanan, chayuananda@gmail.com.

<sup>2</sup> Letjen TNI (Purn) Dr. Yoedhi Swastanto, MBA adalah dosen tetap Universitas Pertahanan sekaligus dosen pembimbing pertama penelitian, yoedhiswastanto83@gmail.com.

<sup>3</sup> Laksda TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD adalah dosen tetap Universitas Pertahanan sekaligus dosen pembimbing kedua penelitian, rosseauherve@gmail.com.

## Pendahuluan

**P**erkiraan ancaman serta tantangan penyelenggaraan pertahanan negara dapat ditentukan melalui analisis perkembangan lingkungan yang strategis. Dalam perspektif keamanan, wilayah Indonesia dan kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan adalah kawasan yang strategis baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun militer. Serta memiliki potensi dan tantangan yang kompleks dan berisiko menimbulkan ketegangan antar negara.

Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara telah memodernisasi kekuatan pertahanannya yang dipengaruhi oleh kemajuan dalam bidang industri dan teknologi pertahanan. Kemajuan dilakukan untuk mengantisipasi atau *preventing situation* dari kemungkinan terjadinya ketegangan sebagai akibat dari ketidakpastian situasi strategis. Namun kemajuan teknologi ini mengalami perubahan yang signifikan dan memengaruhi perubahan kecenderungan bentuk konflik kontemporer. Dalam ruang lingkup ASEAN, setidaknya terdapat isu utama regional yang kemudian menjadi isu strategis serta fokus dalam pertahanan dan kestabilan kawasan. Yakni terorisme, konflik Laut Cina Selatan, konflik Rohingnya, serta krisis di Semenanjung Korea. Penelitian ini akan berfokus pada ancaman yang mungkin akan dihadapi oleh Indonesia terkait dengan isu krisis di Semenanjung Korea.

Adanya ketegangan di Semenanjung Korea ini juga dipengaruhi oleh Korea

Utara sebagai akibat dari tindakannya mengembangkan berbagai jenis misil. *The Korean People's Army (KPA)* yang merupakan nama dari tentara Korea Utara yang terdiri dari *Ground Force, Naval Force, Air Force, Special Operations Force, and Rocket Force*. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, pada tahun 2012 Korea Utara memiliki tentara terbesar keempat di dunia, dengan sekitar 1,21 juta personel bersenjata serta sekitar 20% pria berusia 17–54 tahun dalam angkatan bersenjata reguler. Korea Utara juga memiliki persentase tertinggi personel militer per kapita dari negara mana pun di dunia, dengan sekitar 1 tentara tamtama untuk setiap 25 warga.<sup>4</sup> Selain itu termasuk juga kepemilikan dari 4.060 tank, 2.500 APC, 17.900 artileri, 11.000 senjata pertahanan udara dan sekitar 10.000 MANPADS dan rudal kendali anti-tank. Korea Utara juga memiliki 915 kapal di Angkatan Laut dan 1.748 pesawat di Angkatan Udara, dimana 478 adalah *fighter* dan 180 adalah *bomber*. Menurut media resmi Korea Utara, belanja militer untuk tahun 2010 mencapai 15,8% dari anggaran negara.<sup>5</sup>

Kemudian bagaimana negara-negara di sekitar Semenanjung Korea ini merespons? Pada tahun 2017, Amerika Serikat dan Korea Selatan menjabarkan bahwa mereka akan menggunakan *Terminal High Altitude Area Defence (THAAD)* untuk sistem pertahanan

---

<sup>4</sup> U.S Department of Defense, *Military and Security Developments Involving the Democratic People's Republic of Korea 2012, 2013*.

<sup>5</sup> *Ibid.*

negara mereka dari Korea Utara.<sup>6</sup> Jepang merespons dengan mengerahkan sistem pertahanan peluru kendali tambahan di Hokkaido, karena untuk yang kedua kalinya rudal Korea Utara telah meluncur melewati wilayah udaranya.<sup>7</sup> Sebelumnya Jepang telah mengerahkan sistem pertahanan rudal PAC-3 di sejumlah situs di Hokkaido. Kemudian China dan Rusia tetap menjaga hubungan yang cukup baik dengan Korea Utara dengan tetap menjadi mitra dagang utama.

**Gambar 1.** Luas Jangkauan Ledakan Missil Korea Utara



Sumber : [express.co.uk](http://express.co.uk)

Indonesia juga merupakan salah satu negara yang berdekatan dengan wilayah Semenanjung Korea. Meski tidak berbatasan darat atau laut secara langsung, segala kegiatan yang dilakukan oleh negara yang berada di Semenanjung

<sup>6</sup> BBC News, "AS Mulai Pasang Sistem Pertahanan Rudal Thaad di Korea", dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39189535>, diakses pada 15 Juli 2018.

<sup>7</sup> CNN News, "Waspada Korut, Jepang Kerahkan Pertahanan Rudal Tambahan", dalam <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170919095239-113-242639/waspada-korut-jepang-kerahkan-pertahanan-rudal-tambahan>, diakses pada 15 Juli 2018.

Korea dapat memberikan dampak terhadap kedaulatan dan keamanan negara Indonesia, khususnya kegiatan uji coba nuklir yang telah dilakukan oleh Korea Utara. Sehingga Indonesia harus memiliki kesadaran dalam keamanan nasional guna memproteksi pertahanan bangsa dan negara. Identitas nasional Indonesia sebagai negara mediator dan sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Anti Tes senjata Nuklir atau *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty* (CTBT) berkomitmen untuk mendorong terciptanya dunia yang aman dari segala bentuk tes dan ledakan senjata nuklir.

Indonesia memiliki dampak yang juga patut diwaspadai terkait dengan peluncuran senjata nuklir milik Korea Utara ini diantaranya :

1. Tingkat perekonomian Indonesia yang akan menurun, khususnya yang menggunakan jalur dagang melalui laut.
2. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tingkat global menurun.
3. Perekonomian kawasan Asia Tenggara terancam.
4. Keamanan Kawasan Asia Tenggara terancam.
5. Meluasnya medan perang dari Asia Timur ke Asia Tenggara.
6. Munculnya gerakan-gerakan ekstrimis.

Forum atau *platform* yang digagas untuk mengurangi ketegangan dalam krisis ini sudah dibangun, yakni dalam forum Six

*Party Talks*. Forum ini beranggotakan 6 negara berpengaruh, yakni Korea Selatan, Jepang, Cina, Rusia, Amerika Serikat dan Korea Utara itu sendiri. Dalam forum ini membahas mengenai ide-ide dan gagasan, serta berbagai kompromi yang dicoba dibangun antar negara anggota untuk mengurangi ketegangan. Namun forum ini belum mengalami kemajuan seiring dengan tidak adanya kompromi yang berjalan di antara negara-negara anggotanya.

Dikarenakan Forum *Six Party Talks* tidak berjalan dengan optimal, dirasa perlu adanya dukungan dari negara-negara disekitarnya, yakni negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN merupakan suatu wadah yang dapat menyalurkan ide dan gagasan untuk penyelesaian isu ini. Kemudian Indonesia sebagai negara yang kepemimpinannya diakui di ASEAN, dan memiliki hubungan yang baik dengan Korea Utara yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat menjadi modalitas yang baik bagi Indonesia untuk turut dapat memberi gagasan terkait penyelesaian kasus ini. Untuk itu Indonesia harus turut serta dalam upaya mempertahankan keamanan nasional dan kawasan.

### **Kerangka Kerja untuk Analisis**

Dalam membantu penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan beberapa studi terdahulu yang menjadi sumber informasi dan latar belakang data untuk mendukung penelitian. Studi terdahulu yang akan digunakan penulis

yang pertama adalah sebuah buku yang ditulis oleh L. Carl Brown yang berjudul *Diplomacy in The Middle East: The International Relations of Regional and Outside Powers*. Kemudian artikel jurnal yang ditulis oleh Andi Parwono dan Ahmad Saifuddin Zuhri, berjudul *Peran Nuklir Korea Utara sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional*. Serta buku yang berjudul *Diplomacy and Security in the Twenty-first Century* oleh James E. Nolan.

Tulisan ini juga menggunakan teori Konstruktivis dan Konsep Diplomasi Pertahanan. Teori konstruktivis menggambarkan hubungan antar negara yang terkonstruksi melalui kepentingan, niat, identitas, dan bahasa. Dimana tokoh dari teori ini diantaranya ialah Kratochwil, dan Alexander Wendt. Alexander Wendt, seorang pemikir konstruktivisme dari Jerman menyatakan bahwa terdapat transformasi sistem internasional dari sistem Hobbesian (yang bernuansa konflik dan perang) ke Lockean (rivalitas dan persaingan) dan Kantian (persahabatan/kerjasama).<sup>8</sup> Sehingga dinamika hubungan internasional yang kontemporer selalu berwujud dari sistem Lockean ke Kantian atau sebaliknya. Menurut Wendt<sup>9</sup>, transformasi ini disebabkan karena adanya tiga variabel utama, yakni :

#### **1. Interdependence**

Rasa saling ketergantungan yang kemudian dapat menguatkan dan

---

<sup>8</sup> Alexander Wendt, *Social Theory of International Politics*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), hlm. 335-339.

<sup>9</sup> *Ibid.*

merekatkan hubungan negara-negara dalam kerja sama yang saling menguntungkan.

### 2. *Common Fate*

Rasa sepenanggungan yang kemudian dapat membentuk suatu solidaritas dalam tingkat regional hingga global.

### 3. *Homogeneity*

Persamaan identitas yang kemudian dapat mendorong negara-negara untuk dapat saling memahami dan saling menerima perbedaan.

Ketiga variabel tersebut yang kemudian menurut Wendt<sup>10</sup>, akan mempengaruhi hubungan antar negara nantinya akan berlanjut secara Lockean atau Kantian.

Berikutnya ialah konsep diplomasi pertahanan. Dalam buku *Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan* dijelaskan bahwa Diplomasi Pertahanan dapat didefinisikan sebagai seni untuk mencapai kepentingan nasional dengan menggunakan kemampuan dan sumberdaya pertahanan. Diplomasi Pertahanan ini dilakukan untuk membangun kepercayaan (*trust building*), membentuk opini publik, menurunkan keinginan pihak yang berseberangan untuk melakukan hal yang tidak menguntungkan negara sendiri, menguatkan kemampuan (*increasing capability*), memberikan efek menggetarkan bagi negara lain (*deterrence effect*), dan lain sebagainya.

Menurut Andrew Cottey dan Anthony Forster dalam *Reshaping*

<sup>10</sup> *Ibid.*

*Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance : Introduction*, melibatkan penggunaan angkatan bersenjata secara kooperatif dan infrastruktur terkait (terutama kementerian pertahanan) sebagai alat kebijakan luar negeri dan keamanan.<sup>11</sup> Diplomasi pertahanan mencakup berbagai kegiatan yang mungkin di masa lalu digambarkan sebagai kerja sama militer atau bantuan militer. Kegiatan diplomasi pertahanan dapat dilakukan dalam kegiatan diantaranya sebagai berikut :

1. Terjalannya hubungan bilateral dan multilateral antara pejabat militer dan pejabat sipil pertahanan senior.
2. Penunjukan atase pertahanan di luar negeri.
3. Perjanjian kerja sama pertahanan bilateral.
4. Latihan bersama antara personil pertahanan militer asing dan sipil.
5. Penyediaan keahlian dan saran dalam kontrol demokrasi kekuatan bersenjata, manajemen pertahanan dan bidang teknis militer.
6. Pertukaran personil dan unit militer, dan kunjungan kapal.
7. Penempatan personil militer ataupun sipil di kementerian-kementerian pertahanan atau militer negara sahabat
8. Penyebaran tim pelatih.
9. Penyediaan peralatan militer dan bantuan material lainnya.

<sup>11</sup> A. Cottey dan A. Forster, *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*, (New York: Routledge, 2004).

10. Latihan militer secara bilateral ataupun multilateral.

Tercermin dalam pembukaan UUD tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia ikut serta dalam melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari yang tercermin dalam pembukaan UUD tahun 1945 inilah Indonesia wajib melakukan Diplomasi Pertahanan. Selanjutnya kerja sama internasional dalam rangka Diplomasi Pertahanan dapat pula menjadi salah satu pencegahan konflik melalui *preventive diplomacy* atau diplomasi penangkalan.

### Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kelebihan penggunaan metode kualitatif adalah peneliti dapat mendeskripsikan secara komprehensif, urut serta runut dan berjalan secara mendalam. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran terkait dengan proses, anggapan dan hubungan interaksi dan komunikasi dalam kehidupan sosial. Metode pendekatan kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah Kualitatif Eksplanatoris. Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa dan bagaimana fenomena-fenomena sosial terjadi diantara variabel-variabel penelitian.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Agustinus Bondur, *Penelitian Kualitatif : Metodologi, Desain dan Teknik Analisis Data dengan NVivo 11 plus*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm.49.

### Hasil dan Pembahasan

Setiap negara memiliki sistem keamanan masing-masing yang telah dirancang seksama dengan menyesuaikan kondisi domestiknya. Menurut Lippman, sebuah negara dapat dikatakan aman ketika sedang tidak dalam keadaan bahaya atau terancam dan dapat menyelesaikan masalah dalam keadaan damai tanpa berperang. Jika harus berperangpun, mereka memiliki pertahanan yang cukup untuk memenangkannya.<sup>13</sup> Meskipun keamanan nasional kemudian berubah menjadi hal yang lebih luas dan mengalami perubahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, perubahan lain yang dirasakan pun ikut menjadi beragam. Beberapa diantaranya ialah mulai menguatnya rasa nasionalisme, adanya revolusi industri, proliferasi senjata nuklir, dan sebagainya. Sehingga negara masih menjadi aktor utama dalam melindungi keamanan nasional.<sup>14</sup>

Dimensi baru isu keamanan ini kemudian membuat Barry Buzan merumuskan aspek-aspek dari isu keamanan, yang dituangkan dalam tulisannya yang berjudul *New Pattern of Global Security in the Twentieth Century*. Dalam tulisan tersebut Buzan merumuskan dalam lima aspek keamanan<sup>15</sup>, yakni:

---

<sup>13</sup> Walter Lipman dalam Allan Collin, *Contemporary Security Studies*, Second Edition, (New York: Oxford University Press, 1991)

<sup>14</sup> Norrin. M Ripsman & Paul T.V, *Globalization and the Natural Security States*, dalam Angka Nurdin Rachmat, *Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 6.

<sup>15</sup> Barry Buzan, "New Patterns of Global Security in the Twentieth Century", *International Affairs*, Vol.67, No.3, 1991, hlm. 439-451.

1. Keamanan Politik  
Dimana adanya jaminan untuk mempertahankan hak-hak politik, bebas dari tekanan akibat dari revalitas, dan kebebasan untuk mempertahankan rezim politik.
2. Keamanan Militer  
Adanya kebebasan dari ancaman militer asing dan intervensi militer pihak eksternal.
3. Kemananan Ekonomi  
Jaminan akses terhadap sumber daya alam, sumber keuangan, dan pasar global yang dapat mendukung aktivitas untuk mencapai kesejahteraan sosial
4. Keamanan Masyarakat  
Bebas dari ancaman konflik horizontal antar kelompok baik karena alasan yang premordial seperti (etnis, agama, dan ras) atau alasan penguasaan sumber daya alam, keuangan dan pasar.
5. Keamanan Lingkungan  
Bebas dari ancaman kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan bencana kemanusiaan

Dari segi aspek terkait tentang keamanan nasional menurut Buzan di atas, Indonesia memiliki dasar-dasar yang cukup untuk melindungi keamanan nasionalnya dari krisis di Semenanjung Korea. Indonesia saat ini merupakan negara yang sedang berkembang dan ekonominya dalam setahun belakangan

cenderung meningkat. Jika terjadi sesuatu di wilayah Semenanjung Korea maka itu akan berdampak langsung pada perkembangan ekonomi Indonesia khususnya yang menggunakan jalur laut. Sehingga keamanan nasional merupakan suatu kondisi dimana negara mau melakukan apapun untuk mengurangi potensi ancaman tersebut. Untuk itu diplomasi berperan dalam hal ini.

Dalam buku *Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan* dijelaskan bahwa Diplomasi Pertahanan dapat didefinisikan sebagai seni untuk mencapai kepentingan nasional dengan menggunakan kemampuan dan sumberdaya pertahanan.<sup>16</sup> Diplomasi Pertahanan ini dilakukan untuk membangun kepercayaan (*trust building*), membentuk opini publik, menurunkan keinginan pihak yang bersebrangan untuk melakukan hal yang tidak menguntungkan negara sendiri, menguatkan kemampuan (*increasing capability*), memberikan efek menggetarkan bagi negara lain (*deterrence effect*), dan lain sebagainya.

Berdasarkan 10 aktivitas Diplomasi Pertahanan Menurut Andrew Cottey dan Anthony Forster dalam *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance: Introduction*,<sup>17</sup> Indonesia setidaknya telah melakukan 3 aktivitas dalam rangka menanggapi krisis di semenanjung Korea. Tiga aktivitas tersebut yakni terjalinnya hubungan

<sup>16</sup> Parulian Simamora, *Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 28-31.

<sup>17</sup> A. Cottey dan A. Forster, *op.cit.*

bilateral dan multilateral antara pejabat militer dan pejabat sipil pertahanan senior; Penunjukan atase pertahanan di luar negeri, dan kerja sama pertahanan secara bilateral.

Terjalannya hubungan bilateral antara Indonesia dengan Korea Utara telah terjalin sejak lama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dari segi historis, Indonesia memiliki kedekatan yang khusus dengan Korea Utara. Hal ini terus berlangsung hingga saat ini. Hubungan ini senantiasa diperkuat melalui acara dan forum-forum internasional. Seperti contohnya Pertemuan Menlu RI dan Menlu Korea Utara di sela-sela penyelenggaraan perayaan 50 tahun Gerakan Non-Blok pada bulan Mei 2011 di Bali dan Pertemuan Menlu RI dan Menlu Korea Utara di sela-sela 18th ASEAN Regional Forum pada bulan Juli 2011.<sup>18</sup> Pada kesempatan pertemuan Menlu RI dan Menlu Korea Utara di sela-sela penyelenggaraan perayaan 50 tahun Gerakan Non-Blok pada bulan Mei 2011 di Bali, kedua negara sepakat untuk terus berupaya mengidentifikasi peluang-peluang baru dalam bidang perdagangan, investasi dan *people-to-people contact*. Dilanjutkan pula dengan melaksanakan pertemuan bilateral dengan Menlu Ri Su Yong, tanggal 13 Agustus 2014.<sup>19</sup>

Aktivitas kedua ialah penunjukan atase pertahanan di luar negeri. Atase pertahanan Indonesia untuk Korea Utara saat ini merangkap dengan atase

<sup>18</sup> Kementerian Luar Negeri, *Buku Diplomasi 2011*, (Jakarta: Kemlu RI, 2011).

<sup>19</sup> Kementerian Luar Negeri, *Buku Diplomasi 2014*, (Jakarta: Kemlu RI, 2011), hlm. 50.

pertahanan Indonesia untuk Cina. Namun ini tidak menutup kemungkinan untuk membuat hubungan kedua negara merenggang. Sejak tahun 2014 Diplomasi Indonesia diarahkan untuk mengupayakan adanya solusi, menjembatani perbedaan ke arah kesepahaman dan mendorong terwujudnya konsensus terhadap tantangan tantangan yang dihadapi.<sup>20</sup> Upaya diplomasi mencakup langkah-langkah reaktif dan proaktif pemerintah Indonesia dalam menyikapi perkembangan kepentingan nasional serta perkembangan kondisi kawasan dan global. Arah diplomasi Indonesia sepanjang 2014 diarahkan bukan saja untuk secara langsung menjawab dan mengatasi tantangan-tantangan, melainkan juga untuk mengubah tantangan menjadi peluang-peluang bagi pencapaian kepentingan nasional. Oleh karena itu, diplomasi Indonesia telah menciptakan pendekatan-pendekatan yang inovatif guna mempertajam upaya pemerintah dalam menjawab, mengatasi, dan mengubah segala bentuk tantangan baik yang dihadapi Indonesia maupun yang dihadapi bersama negara-negara lain.

Aktivitas ketiga adalah terjalinnya kerja sama pertahanan secara bilateral. Dalam hal ini belum ada kerja sama pertahanan secara bilateral langsung dengan Korea Utara. Namun sebagai upaya dalam menanggapi krisis di Semanjung Korea, Indonesia berkomitmen melalui kerja sama yang dilakukan dengan Korea Selatan juga dengan negara-negara mitra strategis.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. iii.



Ketujuh aktivitas Diplomasi Pertahanan lainnya yang belum dilaksanakan oleh Indonesia bukan merupakan suatu kegagalan diplomasi, namun sebuah peluang dimana terdapat tantangan kedepannya bagi Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dalam bidang Diplomasi Pertahanan dengan Korea Utara. Sebagai contoh untuk aktivitas kegiatan Penyediaan peralatan militer dan bantuan material lainnya. Pada tahun 2005 Korea Utara tawarkan senjata kepada Indonesia.<sup>21</sup> Korea Utara menawarkan pemerintah Indonesia untuk membeli senjata di antaranya kapal selam dan radar. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan pada saat itu, Mayor Jenderal (Purn) Sudrajat mengatakan tawaran ini sebagai upaya mewujudkan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Korea Utara. Kemhan mengakui persenjataan yang ditawarkan Korea Utara jauh lebih murah dibandingkan negara-negara Barat. Namun pemerintah Indonesia akan mempelajari terlebih dahulu persenjataan tersebut apakah itu bisa sesuai dengan sistem persenjataan yang dibutuhkan.

Hubungan kerja sama bilateral Indonesia dengan negara-negara mitra strategis lainnya juga menunjukkan perluasan dan pendalaman dalam bidang kerja sama. Ini merupakan pendekatan dengan tujuan untuk menunjukkan sinergi potensi yang dimiliki oleh negara-negara lain dengan kepentingan nasional Indonesia. Khususnya dengan negara-

<sup>21</sup> Tempo, "Korea Utara Tawarkan Senjata kepada Indonesia", dalam <https://nasional.tempo.co/read/55617/korea-utara-tawarkan-senjata-kepada-indonesia>, diakses pada 5 Januari 2019.

negara di ASEAN. Berikutnya akan dibahas mengenai Diplomasi Pertahanan ASEAN dan Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam lingkup regional ASEAN.

### **Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam ASEAN**

Menurut Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menjelaskan salah satunya bahwa diplomasi dibekali dengan keteguhan dalam prinsip dan pendirian, ketegasan dalam sikap, kegigihan dalam upaya namun luwes dan rasional dalam pendekatan yang bersumber pada kepercayaan diri sendiri. Sehingga suatu negara dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya dalam menangani dan memecahkan suatu permasalahan. Termasuk diantaranya sumber daya pertahanan.

Dalam buku *Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan* dijelaskan bahwa Diplomasi Pertahanan dapat didefinisikan sebagai seni untuk mencapai kepentingan nasional dengan menggunakan kemampuan dan sumberdaya pertahanan.<sup>22</sup> Diplomasi Pertahanan ini dilakukan untuk membangun kepercayaan (*trust building*), membentuk opini publik, menurunkan keinginan pihak yang bersebrangan untuk melakukan hal yang tidak menguntungkan negara sendiri, menguatkan kemampuan (*increasing capability*), memberikan efek menggetarkan bagi negara lain (*deterrence effect*), dan lain sebagainya.

<sup>22</sup> Parulian Simamora, *op.cit*, hlm. 28-31.

Sebagai ketua ASEAN pada tahun 2011, Indonesia menunjukkan kepemimpinan dalam mendorong dicapainya tiga prioritas keketuaan Indonesia di tahun 2011 yaitu (i) Kemajuan yang signifikan dalam pencapaian Komunitas ASEAN tahun 2015 (ii) Dipeliharanya kondisi kawasan Asia-Pasifik yang aman dan stabil (iii) menggulirkan visi ASEAN untuk sepuluh tahun mendatang sesuai tema “*ASEAN Community in a Global Community of Nation*”.<sup>23</sup> Indonesia juga memainkan peran penting dalam proses pembentukan arsitektur kawasan di Asia Pasifik. Konsep Indonesia mengenai *dynamic equilibrium* di kawasan dan perluasan keanggotaan *East Asia Summit* (EAS) yang mencangkup Amerika Serikat dan Rusia telah diterima oleh negara-negara di kawasan.

Dari beberapa negara yang menjalin kemitraan strategis dengan Indonesia (Cina, Jepang, India, Amerika Serikat, Rusia, Korea Selatan dan Australia), Republik Korea Selatan merupakan negara yang paling aktif dalam menindaklanjuti Kemitraan Strategis. Bagi Korea Selatan, Indonesia memiliki arti strategis dan menjadi prioritas utama dalam kerja sama pertahanan keamanan di antara negara ASEAN karena 99 persen impor minyak dan 30 persen perdagangan Republik Korea melewati selat Malaka.<sup>24</sup>

Indonesia sebagai negara yang meratifikasi CTBT juga berkomitmen khusus dalam bidang perlucutan senjata.

<sup>23</sup> Kementerian Luar Negeri, *Buku Diplomasi 2011*, op.cit, hlm. 4.

<sup>24</sup> Kementerian Luar Negeri *Buku Diplomasi 2014*, op.cit, hlm. 30.

Telah tercapai perkembangan yang cukup signifikan yaitu diselesaikannya perundingan antara mitra negara-negara ASEAN dan negara-negara pemilik senjata nuklir tentang Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara serta dirampungkannya proses ratifikasi CTBT pada tahun 2011.

Di wilayah Asia Pasifik sendiri, sejak awal tahun kehadiran Angkatan Laut Amerika Serikat di kawasan tersebut telah meningkat secara signifikan. Pada Februari 2017, sebuah kelompok tempur kapal induk angkatan laut Amerika yang dipimpin oleh USS Carl Vinson memasuki Laut Cina Selatan.<sup>25</sup> Sejak itu, pasukan Amerika kerap mempertontonkan latihan militer gabungan dengan Korea Selatan. Persaingan unjuk kekuatan militer antara Amerika Serikat dan Korea Utara di kawasan pun menjadi pusat perhatian dunia internasional. Di tahun 2017, Korea Utara sudah melakukan 19 kali uji coba senjata nuklir dan lebih banyak jika dibandingkan pada tahun 2016 di mana Korut hanya 8 kali uji coba senjata nuklir.

ASEAN memiliki nilai strategis dan daya tarik ekonomi, menjadi pasar internasional dan pusat pertumbuhan ekonomi dunia memastikan adanya stabilitas keamanan di kawasan dan tentu harus menjadi zona bebas senjata nuklir. Dalam kapasitas ini, Indonesia bisa menjadi aktor penting di ASEAN dalam mengatasi

<sup>25</sup> The Global Review, “Indonesia Dapat Menjadi Pemain Kunci Dalam Penyelesaian Krisis di Semenanjung Korea”, dalam <http://theglobal-review.com/ri-bisa-menjadi-aktor-kunci-penyelesaian-krisis-di-semenanjung-korea/>, diakses pada 3 Januari 2019.

ketegangan yang terjadi di Semenanjung Korea. Indonesia telah memiliki modalitas yang baik yakni sebagai merupakan salah satu negara pemimpin ASEAN dengan latar belakang hubungan historis dan relasi yang baik dengan Korea Utara sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno.

Selain secara bilateral Indonesia juga berperan dalam kerja sama multilateral bisa dalam forum ASEAN+1, yaitu ASEAN *centrality* dengan Amerika Serikat, ASEAN dengan Cina, ASEAN dengan Rusia, dan lain-lain. Maka melalui forum ASEAN+1, Indonesia dapat menjadi aktor penting dalam penyelesaian krisis di Semenanjung Korea. Dalam tingkat global, Indonesia secara konsisten memberikan perhatian yang khusus dan memainkan peran aktif di PBB dalam menangani masalah keamanan dan perdamaian internasional.

Dalam bidang perlucutan senjata dan nonproliferasi, Indonesia pada tahun 2011 terus memainkan perannya sebagai salah satu negara yang konsisten dalam memajukan perlucutan senjata dan non-proliferasi (*disarmament and non-proliferation*), khususnya senjata pemusnah massal (nuklir, biologi dan kimia), serta isu-isu terkait pengaturan senjata konvensional (*arms control*). Sejak tahun 1994, Indonesia menjadi Koordinator Kelompok Kerja Negara-Negara Gerakan Non-Blok untuk isu perlucutan senjata. Indonesia terus berperan aktif dalam setiap pertemuan multilateral mengenai perlucutan senjata, baik di forum-forum PBB maupun forum-forum lainnya, seperti Komite I Majelis Umum PBB di New York yang

membahas berbagai isu *International Security and Disarmament; United Nations Disarmament Commission (UNDC)* di New York; dan Konferensi Perlucutan Senjata (*Conference on Disarmament/CD*) di Jenewa.<sup>26</sup>

Mengenai isu penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai (*peaceful uses of nuclear energy*), Indonesia selalu menekankan pentingnya seluruh aspek terkait *peaceful uses* tersebut untuk dijalankan secara seimbang, baik dari segi *safeguard, safety*, maupun *security*. Indonesia terus bekerja sama dengan negara-negara lain terutama dalam konteks *capacity building* di bidang tersebut.

Dalam konteks keamanan nuklir (*nuclear security*), Indonesia terus berpartisipasi dalam berbagai pertemuan tingkat Sherpa dan Sous-Sherpa mengenai tindak lanjut *Nuclear Security Summit (NSS)*. Indonesia telah ditunjuk menjadi salah satu fasilitator dari topik pembahasan mengenai model *legislation/ treaty ratification* terkait *nuclear security*.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan ASEAN diantaranya sejalan dengan teori konstruktivisme yang digunakan dalam penelitian ini yakni mendekati aktor-aktor yang memiliki *common challenging* untuk dapat merumuskan suatu kebijakan bersama. Melihat poin-poin strategis yang dimiliki oleh Indonesia tersebut, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih penting diantaranya :

<sup>26</sup> Kementerian Luar Negeri, *Buku Diplomasi 2011*, *op.cit*, hlm. 206.

1. Dalam forum *six party talks* yang tidak berjalan, Indonesia masih dapat memosisikan diri sebagai pengamat dalam forum tersebut.
2. Mengajak negara-negara di regional Asia Tenggara untuk menekan Korea Utara agar mau kembali berdialog di dalam *six party talks*.
3. Mengajak Cina dan Rusia untuk berusaha membentuk suatu mekanisme yang dapat membawa Korea Utara kembali lagi dalam forum *six party talks*.
4. Dengan hubungan baik yang telah dibina lama Indonesia dapat selalu memberikan bujukan untuk Korea Utara agar melunakkan sikapnya.

Disampaikan pula oleh Desra Percaya Ph.D, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri, opsi yang bisa diperankan oleh Indonesia adalah menggunakan *defensive realisme* yang mana untuk mengetahui niat, diperlukan komunikasi dan *engagement* antar pihaknya sehingga dialog menjadi krusial.<sup>27</sup> *Engagement* diperlukan supaya pihak-pihak mengerti kekhawatiran Korea Utara terhadap konflik ini.

Berikutnya sesuai dengan konsep kerjasama internasional. Kerjasama dalam bidang pertahanan lebih dikembangkan dalam model kerja sama bilateral, regional maupun multilateral untuk membangun *confidence building measure*.

<sup>27</sup> Desra Percaya dalam “Seminar Diplomasi Pertahanan Republik Indonesia: Menanggapi Krisis di Semenanjung Korea”, Universitas Indonesia, Selasa, 18 Desember 2017.

Dimana didalamnya terdapat bagaimana komunikasi terkait isu-isu pertahanan dan keamanan yang dapat ditangani bersama, kemudian peningkatan kapasitas dan kapabilitas pertahanan negara. Peningkatan kapabilitas dan kapasitas melalui kerja sama pertahanan diimplementasikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan alutsista dan peningkatan profesionalisme prajurit. Selain itu juga termasuk tugas-tugas yang berkaitan dengan operasi militer selain perang seperti penanggulangan terorisme dan bencana alam.<sup>28</sup>

Indonesia harus memastikan Korea Utara kembali ke norma-norma internasional, piagam PBB, dan rezim NPT. Desra melihat bahwa untuk membuat Korea Utara mengabaikan kapasitas nuklirnya menjadi hal yang tidak mungkin karena denuklirisasi itu menjadi bagian dari negosiasi itu sendiri, bukan sebagai prakondisi atau prasyarat bagi negosiasi. Indonesia dapat melakukannya dengan postur kebijakan luar negeri Indonesia menggunakan *bridge-building* atau *partner discussion*. *Peaceful solution* melalui negosiasi tetap menjadi hal penting, juga dengan tetap menciptakan *confidence building measure* tersebut. Indonesia perlu segera mendorong pihak-pihak yang terkait untuk segera mengeluarkan status. Kemudian langkah-langkah yang menyangkut *confidence building measure* harus selalu didorong ke arah perdamaian, tidak terlampau menyudutkan suatu negara yang tengah melakukan *self defence*. Jadi oleh karena

<sup>28</sup> Parulian Simamora, *op.cit*, hlm. 43.

itu, Indonesia harus menganjurkan supaya tidak menyudutkan salah satu pihak agar perdamaian tersebut dapat dicapai.

### **Peran Para Aktor yang Terlibat dalam Krisis di Semenanjung Korea**

Peran Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN untuk terus berdialog dan menyamakan tujuan untuk menemukan inisiatif baru dalam penyelesaian krisis di Semenanjung Korea terus dilakukan. Namun tidak menutup kemungkinan adanya aktor-aktor selain negara yang berperan dalam penanganan kasus ini.

Berbeda dengan pembicaraan pertahanan yang disponsori ekstra-regional, platform konsultatif yang berpusat di ASEAN telah membawa perubahan signifikan pada tatanan keamanan regional. *ASEAN Way* yang melibatkan pembangunan konsensus dan pendekatan non-konfrontasional dianggap sebagai strategi yang paling dapat diterima untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional.

Dalam pandangan Menteri Pertahanan Indonesia, ADMM adalah sarana regional untuk mencapai dua tujuan utama.<sup>29</sup> Pertama, pembicaraan pertahanan yang berpusat di ASEAN membantu meningkatkan “paritas teknologi” di antara negara-negara Asia Tenggara, melalui memastikan bahwa perkembangan politik domestik dan kemajuan ekonomi menjadi saling

<sup>29</sup> Iis Ginarsih, “Roundtable on the Future of The ADMM/ADMM-Plus and Defence Diplomacy in the Asia Pacific”, *RSIS Policy Report*, (Singapura: Nanyang Technology University, 2016).

menguatkan. Kedua, dengan kebangkitan Cina dan India, ADMM-Plus memungkinkan terciptanya “ruang strategis” untuk mengakomodasi kepentingan kekuatan ekstra-regional di wilayah tersebut.

Dalam forum ADMM pembahasan tentang isu keamanan di Semenanjung Korea sering dibahas. Terdapat pertukaran ide dan pandangan terkait isu ini. Anggota ADMM bertukar pandangan tentang masalah keamanan dan pertahanan regional dan internasional. Beberapa fokus utama selama pertukaran pandangan adalah tentang terorisme dan ekstremisme kekerasan, keamanan maritim, non-proliferasi senjata nuklir, keamanan siber, dan *High Availability Disaster Recovery* (HADR).

Beberapa negara mengutuk Korea Utara karena peluncuran rudal balistik yang banyak melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB. Pertemuan tersebut juga bergabung dengan kawasan dan seluruh dunia dalam menyerukan agar Korea Utara meninggalkan program senjata nuklir dan mendesak Korea Utara untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Ditegaskan kembali dalam pertemuan ADMM bahwa tujuan bersama untuk mencapai verifikasi yang lengkap dan tidak dapat diubah tentang denuklirisasi Semenanjung Korea serta dimulainya kembali dialog untuk mencapai hal ini.<sup>30</sup>

Jepang sebagai negara yang tergabung dalam *Six Party Talks* juga

<sup>30</sup> ADMM Meeting, “Chairman’s Statement On The Fourth Asean Defence Ministers’ Meeting-Plus (4th Admm-Plus)”, Manila, 24 Oktober 2017.

telah setuju untuk mendesak perubahan kebijakan di Korea Utara.<sup>31</sup> Menteri Pertahanan Jepang, Menteri Onodera, menyatakan bahwa uji coba nuklir dan peluncuran rudal yang dilakukan berulang kali oleh Korea Utara merupakan tantangan langsung bagi masyarakat internasional dan menimbulkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya, besar dan segera.<sup>32</sup> Lebih jauh, Menteri Onodera menggaris bawahi bahwa untuk mendesak perubahan kebijakan di Korea Utara untuk meninggalkan semua program rudal nuklir dan balistik. Serta masyarakat internasional perlu berdiri dalam solidaritas dan memberikan tekanan maksimum kepada Korea Utara.<sup>33</sup>

Dalam pertemuan Jepang dengan Amerika Serikat juga telah disepakati untuk saling berbagi informasi tentang situasi pengembangan nuklir dan rudal oleh Korea Utara, serta sepakat untuk memastikan postur pertahanan terbaik. Mereka mengonfirmasi untuk mempromosikan kerja sama yang lebih erat di sisi operasional dan bekerja sama dalam pengenalan aset *Ballistic Missile Defense* (BMD) yang baru. Dari pihak AS, Sekretaris Mattis berkomitmen memperbarui tekad kuat pada pertahanan Jepang termasuk komitmen untuk pencegahan yang lebih lama. Mattis juga menegaskan bahwa mereka akan

<sup>31</sup> Japan Ministry of Defense Defense Minister's Participation in the 4th ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus, the 3rd ASEAN-Japan Defence Ministers' Informal Meeting, and Bilateral and Trilateral Defense Ministerial Meetings, 2017, [http://www.mod.go.jp/e/d\\_act/exc/admm/admmplus\\_4.html](http://www.mod.go.jp/e/d_act/exc/admm/admmplus_4.html), diakses pada 5 Januari 2019.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

berkoordinasi erat pada langkah-langkah masa depan, terus memberikan tekanan pada Korea Utara dengan cara yang nyata dan memajukan kerjasama trilateral yang erat antara Jepang, Amerika Serikat, dan Republik Korea.

Selanjutnya dalam forum ARF rutin mengadakan *Workshop on Raising Awareness and Promoting Cooperation on Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Risk Mitigation*. Di ranah ARF, para aktor tetap saling menyuarakan posisi mereka. Terutama terkait dengan resolusi yang akan dicapai dan kebijakan-kebijakan yang akan diimplementasikan. Pada dasarnya Korea Utara mau menurunkan tingkat ketegangan ini, namun ancaman yang ada juga harus dihilangkan terlebih dahulu. Karena Korea Utara dari dulu tetap berusaha mandiri dengan segala cara, untuk itu mereka menjadi negara yang tertutup. Ini menjadi salah satu kendala yang dirasakan tidak hanya oleh Indonesia, namun juga negara-negara disekitarnya. Dalam regional ASEAN, aktor-aktor yang dapat berpengaruh tidak hanya negara anggota ASEAN saja, namun juga negara disekitarnya.

Sebagai contoh selama ini ASEAN menjalin kerja sama yang baik dengan Korea Selatan. Menurut Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Chang-beom, ASEAN memainkan peran signifikan bagi tercapainya perdamaian di Semenanjung Korea.<sup>34</sup> Selain keberhasilan

<sup>34</sup> Valerie Dante, "ASEAN Berperan Penting dalam Perdamaian Semenanjung Korea", dalam <https://www.alinea.id/dunia/asean-berperan-penting-dalam-perdamaian-semenanjung-korea->

Indonesia menyatukan kedua Korea pada Asian Games 2018, Indonesia melalui ASEAN juga terus membangun hubungan yang baik. Dalam KTT ASEAN di Singapura pada tahun 2018 juga disampaikan dalam pernyataan bersama pemimpin ASEAN yang dirilis setelah KTT<sup>35</sup> juga disebut mengenai komitmen Korea Utara untuk melakukan denuklirisasinya. Langkah-langkah ini menegaskan peran dan kontribusi yang dilakukan Indonesia melalui ASEAN dalam proses penciptaan perdamaian. Dalam pertemuan tersebut para pemimpin dari negara-negara ASEAN juga kembali mengingatkan komitmen Korea Utara untuk melucuti seluruh senjata nuklir dan uji coba rudal.

Pemerintah Korea Selatan juga berharap negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, membantu proses perdamaian di Semenanjung Korea. Hal itu disampaikan Korea Selatan dalam pertemuan ke-22 ASEAN-Korea Selatan yang berlangsung di Seoul. Pertemuan Inter-Korea yang dilaksanakan April dan Mei 2018, serta pertemuan Amerika Serikat–Korea Utara pada Juni 2018 menghasilkan komitmen tertinggi untuk perdamaian dan denuklirisasi Semenanjung Korea.<sup>36</sup> Komitmen seperti

b1UAj9f7v, diakses pada 1 Januari 2019.

<sup>35</sup> Antara News, “Peran Indonesia dalam Perdamaian Semenanjung Korea Diapresiasi”, dalam <https://www.antarane.ws.com/berita/772081/peran-indonesia-dalam-perdamaian-semenanjung-korea-diapresiasi>, diakses pada 5 Januari 2019.

<sup>36</sup> Victor, “Korsel Berharap ASEAN Bantu Wujudkan Perdamaian di Semenanjung Korea”, dalam <https://international.sindonews.com/read/1315942/40/korsel-berharap-asean-bantu-wujudkan-perdamaian-di-semenanjung-korea-1529827154>, diakses pada 5 Januari 2019.

ini belum pernah didapat sebelumnya. Menurut Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Korea Selatan meminta ASEAN memberikan waktu agar proses damai dapat terus berjalan, termasuk dengan memberi kesempatan Korut untuk menyelesaikan tantangan politik dalam negeri.

Selain itu, harapan ASEAN untuk dapat terus memainkan peran penting dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea disampaikan oleh pemerintah Korea Selatan. Salah satunya dengan tetap memberi sambutan positif atas perkembangan proses damai dan jika saatnya tiba, ASEAN dapat memberikan sumbangsih dalam proses transisi di Korea Utara, mengingat kapasitas ASEAN dalam perdamaian dan transformasi politik yang damai.

Indonesia juga juga menyambut baik inisiatif *New Southern Policy* yang dikembangkan oleh pemerintah Korea Selatan sebagai komitmen peningkatan kerja sama dengan ASEAN dan negara anggotanya. Kebijakan ini akan berporos pada tiga isu utama: *people* (manusia), *prosperity* (kesejahteraan), dan *peace* (perdamaian).<sup>37</sup> Peningkatan hubungan ekonomi dan budaya, serta semakin terikatnya stabilitas di Asia Tenggara dan Asia Timur menjadi alasan pembentukan kebijakan yang digagas langsung oleh Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in.

<sup>37</sup> Kementerian Luar Negeri, “Indonesia Ajak Korea Selatan Tingkatkan Kerja Sama Kelautan”, 2018, dalam <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Indonesia-Ajak-Korea-Selatan-Tingkatkan-Kerja-Sama-Kelautan.aspx>, diakses pada 5 Januari 2018.

Presiden Moon berasumsi dengan rasio pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil hingga 5%, Indonesia menjadi negara yang penting di ASEAN. Sehingga Korea Selatan juga mendorong pembangunan ekonomi inklusif dengan negara-negara di ASEAN khususnya Indonesia.<sup>38</sup> Indonesia adalah negara ASEAN pertama yang dikunjungi oleh Presiden Moon setelah terpilih menjadi Presiden Korea Selatan. Guna meningkatkan hubungan Korsel dengan ASEAN secara drastis, Presiden Moon mendorong pelaksanaan *New Southern Policy*. Lingkup kerja sama dengan Indonesia meluas hingga mencakup pengembangan dan produksi bersama pesawat tempur serta kapal selam. Kedua negara akan meningkatkan perdagangan hingga 30 miliar dollar AS sampai tahun 2022 serta memperkuat kerja sama di bidang petrokimia, otomotif, dan manufaktur peralatan mesin.<sup>39</sup>

*Head of Commercial Banking, Standard Chartered Bank Korea* Hyon Joo Park menerangkan, dalam penerapan kebijakan *New Southern Policy* ini Korea Selatan mencanangkan rencana investasi sebesar USD 2,6 miliar ke negara-negara ASEAN. USD 1,9 miliar diantaranya akan diinvestasikan ke Indonesia.<sup>40</sup> Rencana tersebut terdiri dari enam fokus kerja

<sup>38</sup> Wawancara Presiden Korea Selatan, "Relasi Antarmasyarakat Penting", *Kompas*, 7 September 2018, diakses pada 5 Januari 2019.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Berita Hati, "New Southern Policy Korsel, Tanam USD 1,9 miliar investasi di Indonesia", <http://beritahati.com/berita/38908/New%2BSouthern%2BPolicy%2BKorsel%2BTanam%2BUSD%2B1%2C9%2Bmiliar%2Binvestasi%2Bdi%2BIndonesia>, 6 Desember 2017, diakses pada 5 Januari 2019.

sama yang meliputi pemulihan serta revitalisasi kerja sama ekonomi bilateral, seperti <sup>41</sup>:

1. Diversifikasi di bidang kerja sama ekonomi.
2. Memperluas cakupan kerja sama di bidang pertahanan dan kesehatan.
3. Meningkatkan kerja sama dalam sektor industri utama.
4. Mendorong kerja sama ekonomi yang berpusat pada pengembangan SDM.
5. Meningkatkan dukungan bagi perusahaan skala kecil dan menengah.
6. Memperluas cakupan sektor perdagangan yang meliputi mesin dan barang konsumsi.

Indonesia selama ini berperan penting dalam memimpin proses pendirian dan pengintegrasian ASEAN. Pada saat ini ASEAN juga memiliki peran penting di kancah internasional. Untuk itu Presiden Moon juga menjelaskan bahwa peningkatan hubungan Korea Selatan dengan ASEAN agar sejajar terhadap hubungan Korea Selatan dengan empat negara kuat di sekitarnya. Hal ini mengandung arti Korea ingin memperluas lingkup kerja sama, tak hanya ekonomi, tetapi semua bidang, termasuk diplomasi dan keamanan.

Hal itu merupakan visi dalam *New Southern Policy* yang Korea Selatan deklarasikan di Jakarta pada November

<sup>41</sup> *Ibid.*



2017. Tujuan utamanya membangun kemitraan masa depan demi masyarakat, kesejahteraan bersama, dan perdamaian dengan memperluas hubungan kerja sama Korea Selatan dengan ASEAN.<sup>42</sup> Kebijakan ini memperkuat landasan kerja sama persahabatan dengan meningkatkan pertukaran antar masyarakat, memperbanyak kesempatan mencapai kesejahteraan bersama, serta memberikan kontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia.

## Kesimpulan

1. Diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia dalam menanggapi krisis di Semenanjung Korea dapat dioptimalkan kembali seiring dengan modalitas yang dimiliki Indonesia. Diantaranya ialah: a) Dalam forum *Six Party Talks* yang tidak berjalan, Indonesia masih dapat memosisikan diri sebagai pengamat dalam forum tersebut; b) Mengajak negara-negara di regional Asia Tenggara untuk menekan Korea Utara agar mau kembali berdialog di dalam *Six Party Talks*; c) Mengajak Cina dan Rusia untuk berusaha membentuk suatu mekanisme yang dapat membawa Korea Utara kembali lagi dalam forum *Six Party Talks*; d) Dengan hubungan baik yang telah dibina lama, Indonesia dapat selalu memberikan bujukan untuk Korea Utara agar melunakkan sikapnya.

---

<sup>42</sup> “Wawancara Presiden Korea Selatan: Relasi Antar Masyarakat Penting”, *Kompas*, 7 September 2018.

2. Peran dari para aktor yang terkait dalam penyelesaian isu krisis di Semenanjung Korea ini dilakukan melalui diplomasi dan negosiasi guna menjaga keamanan kawasan Asia Tenggara. Kegiatan ini tidak hanya negara-negara anggota ASEAN saja, namun juga negara aktor lain dari luar ASEAN. Selain melalui forum ARF, para aktor juga banyak berperan dalam forum ADMM dan ADMM-plus.

## Rekomendasi

Diplomasi yang dilakukan Indonesia melalui hubungan bilateral maupun melalui ASEAN disarankan untuk dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya. Khususnya terkait dengan peran Indonesia dalam penyelesaian konflik kawasan atau intra-kawasan yang dapat dilakukan menggunakan diplomasi sebagai metode penyelesaian masalah dengan cara damai.

Sebagai negara yang memiliki peran cukup penting dalam sistem internasional, saran yang bisa diberikan melalui penelitian ini terhadap Kementerian serta lembaga-lembaga terkait yang turut dalam membuat kebijakan ialah untuk lebih memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Potensi dan posisi Indonesia saat ini sangat strategis dan memiliki kekuatan untuk memberikan pengaruh pada suatu sistem. Sebagai negara yang kepemimpinannya diakui di kawasan regional, Indonesia memiliki potensi untuk lebih “didengar” oleh mitra strategis. Untuk itu, hal ini dapat dijadikan

kelebihan bagi Indonesia untuk menjadi salah satu negara yang berpengaruh dan memiliki andil dalam sistem internasional.

## Daftar Pustaka

### Buku

Bondur, Agustinus. 2016. *Penelitian Kualitatif : Metodologi, Desain dan Teknik Analisis Data dengan NVivo 11 plus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Cottey A, dan A. Forster. 2004. *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military*

*Cooperation and Assistance*. New York: Routledge.

Kementerian Luar Negeri. 2011. *Buku Diplomasi 2014*. Jakarta: Kemlu RI.

-----, 2011. *Buku Diplomasi 2011*. Jakarta: Kemlu RI.

Lipman, Walter dalam Allan Collin. 1991. *Contemporary Security Studies*, Second Edition. New York: Oxford University Press.

Norrin, M Ripsman & Paul T.V. 2015. *Globalization and the Natural Security States*, dalam Angga Nurdin Rachmat, *Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*. Bandung: Alfabeta.

Simamora, Parulian. 2013. *Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

U.S Department of Defense. 2013. *Military and Security Developments Involving the Democratic People's Republic of Korea 2012*.

Wendt, Alexander.1999. *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.

### Jurnal

Buzan, Barry. 1991. "New Patterns of Global Security in the Twentieth Century". *International Affairs*. Vol.67. No.3.

## Website

Antara News, "Peran Indonesia dalam Perdamaian Semenanjung Korea Diapresiasi", dalam <https://www.antaraneews.com/berita/772081/peran-indonesia-dalam-perdamaian-semenanjung-korea-diapresiasi>, diakses pada 5 Januari 2019.

BBC News, "AS Mulai Pasang Sistem Pertahanan Rudal Thaad di Korea", dalam <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39189535>, diakses pada 15 Juli 2018.

Berita Hati, "New Southern Policy Korsel, Tanam USD 1,9 miliar investasi di Indonesia", <http://beritahati.com/berita/38908/New%2BSouthern%2BPolicy%2BKorsel%2BTanam%2BUSD%2B1%2BC9%2Bmiliar%2Binvestasi%2Bdi%2BIndonesia>, 6 Desember 2017, diakses pada 5 Januari 2019.

CNN News, "Waspada Korut, Jepang Kerahkan Pertahanan Rudal Tambahan", dalam <https://www.cnnindonesia.com/rasional/20170919095239-113-242639/waspada-korut-jepang-kerahkan-pertahanan-rudal-tambahan>, diakses pada 15 Juli 2018.

Dante, Valerie, "ASEAN Berperan Penting dalam Perdamaian Semenanjung Korea", dalam <https://www.alinea.id/dunia/asean-berperan-penting-dalam-perdamaian-semenanjung-korea-b1UAj9f7v>, diakses pada 1 Januari 2019

Japan Ministry of Defense Defense Minister's Participation in the 4th ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus, the 3rd ASEAN-Japan Defence Ministers' Informal Meeting, and Bilateral and Trilateral Defense Ministerial Meetings, 2017, [http://www.mod.go.jp/e/d\\_act/exc/admm/admmplus\\_4.html](http://www.mod.go.jp/e/d_act/exc/admm/admmplus_4.html), diakses pada 5 Januari 2019.

Kementerian Luar Negeri, "Indonesia Ajak Korea Selatan Tingkatkan Kerja Sama Kelautan", 2018, dalam <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Indonesia-Ajak-Korea-Selatan-Tingkatkan-Kerja-Sama-Kelautan.aspx>, diakses pada 5 Januari 2018.

Tempo, “Korea Utara Tawarkan Senjata kepada Indonesia”, dalam <https://nasional.tempo.co/read/55617/korea-utara-tawarkan-senjata-kepada-indonesia>, diakses pada 5 Januari 2019.

The Global Review, “Indonesia Dapat Menjadi Pemain Kunci Dalam Penyelesaian Krisis di Semenanjung Korea”, dalam <http://theglobal-review.com/ri-bisa-menjadi-aktor-kunci-penyelesaian-krisis-di-semenanjung-korea/>, diakses pada 3 Januari 2019.

Victor, “Korsel Berharap ASEAN Bantu Wujudkan Perdamaian di Semenanjung Korea”, dalam <https://international.sindonews.com/read/1315942/40/korsel-berharap-asean-bantu-wujudkan-perdamaian-di-semenanjung-korea-1529827154>, diakses pada 5 Januari 2019.

## Laporan

Gindarsih, lis. 2016. “Roundtable on the Future of The ADMM/ADMM-Plus and Defence Diplomacy in the Asia Pacific”. *RSIS Policy Report*. Singapura: Nanyang Technology University.

## Surat Kabar

“Wawancara Presiden Korea Selatan: Relasi Antar Masyarakat Penting”, *Kompas*, 7 September 2018.

## Lain-lain

ADMM Meeting, “Chairman’s Statement On The Fourth Asean Defence Ministers’ Meeting-Plus (4th Admm-Plus)”, Manila, 24 Oktober 2017.

Desra Percaya dalam “Seminar Diplomasi Pertahanan Republik Indonesia: Menanggapi Krisis di Semenanjung Korea”, Universitas Indonesia, Selasa, 18 Desember 2017.

